

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA. 018.05.0500.567338
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2017**

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017



Jl. Raya Mojoagung 52 Jombang

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN
(BBPPTP) SURABAYA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016**

Uraian	Kebutan	31 Desember 2017		31 Desember 2016	
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	165,100,000.00	151,206,132.00	91.58	182,083,818.00
Jumlah Pendapatan		165,100,000.00	151,206,132.00	91.58	182,083,818.00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.2	12,165,295,000.00	11,661,409,972.00	95.88	11,864,540,118.00
Belanja Barang	B.3	7,122,796,000.00	6,488,664,185.00	91.10	9,220,773,995.00
Belanja Modal	B.4	654,463,000.00	602,790,995.00	92.10	3,335,935,150.00
Jumlah Belanja		19,942,554,000.00	18,752,865,152.00	94.03	24,421,259,263.00

Jombang, 02 Januari 2018

Kuasa Pengguna Anggaran,



Ari Praptono, SP.

NIP. 187409131999031001

**BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN
(BBPPTP) SURABAYA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016**

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
ASET			
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1	21,891,708,636.00	21,891,708,636.00
Peralatan dan Mesin	C.2.2	48,518,600,291.00	47,929,972,291.00
Gedung dan Bangunan	C.2.3	25,289,402,587.00	25,289,402,587.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	740,829,495.00	726,666,500.00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	122,847,550.00	122,847,550.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	6,859,200.00	6,859,200.00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.2.7	-33,504,674,702.00	-28,958,152,905.00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	C.2.7	-7,813,600,897.00	-7,418,078,677.00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.7	-151,886,205.00	-123,476,391.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	C.2.7	-6,050,000.00	-6,050,000.00
Jumlah Aset Tetap		65,094,036,955.00	69,461,698,791.00
Jumlah Aset		65,094,036,955.00	69,461,698,791.00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	29,703,750.00	0.00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		29,703,750.00	0.00
Jumlah Kewajiban		29,703,750.00	0.00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.1	55,064,332,205.00	59,461,698,791.00
Jumlah Ekuitas		55,064,332,205.00	59,461,698,791.00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		89,024,036,955.00	89,461,698,791.00

Jombang, 02 Januari 2018

Kuasa Pengguna Anggaran,

Ardi Praptono, SP.

NIP. 197409131999031001

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN
(BBPPTP) SURABAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016**

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
EKUITAS AWAL	E.1	59,461,698,791.00	61,819,870,655.00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	-22,999,025,606.00	-25,821,187,424.00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	0.00	0.00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4		
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.1	0.00	-776,199,885.00
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.2	0.00	0.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	18,601,659,020.00	24,239,215,445.00
EKUITAS AKHIR		55,064,332,205.00	59,461,698,791.00

Jombang, 02 Januari 2018

Kuasa Pengguna Anggaran,



Ard Praptono, SP.

NIP. 197409131999031001

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s d 20 Tahun

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Gedung dan Bangunan	10 s d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 Tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan .
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan .

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi .
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

A PENJELASAN UMUM**A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya**

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan (agar disesuaikan sesuai dengan kebijakan teknis yang ada di instansi masing-masing).

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dan perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 ASET TETAP

C.1.1 TANAH

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.21,891,708,636.00 dan Rp.21,891,708,636.00.

C.1.2 PERALATAN DAN MESIN

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.48,518,600,291.00 dan Rp.47,929,972,291.00.

C.1.3 GEDUNG DAN BANGUNAN

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.25,289,402,587.00 dan Rp.25,289,402,587.00.

C.1.4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.740,829,495.00 dan Rp.726,666,500.00.

C.1.5 ASET TETAP LAINNYA

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.122,847,550.00 dan Rp.122,847,550.00.

C.1.6 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.6,859,200.00 dan Rp.6,859,200.00. yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian lebih lanjut dari Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

C.1.7 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.-41,476,211,804.00 dan Rp.-36,505,757,973.00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	48,518,600,291.00	-33,504,674,702.00	15,013,925,589.00
2.	Gedung dan Bangunan	25,289,402,587.00	-7,813,600,897.00	17,475,801,690.00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	740,829,495.00	-151,886,205.00	588,943,290.00
4.	Aset Tetap Lainnya	122,847,550.00	-6,050,000.00	116,797,550.00
Akumulasi Penyusutan		74,671,679,923.00	-41,476,211,804.00	33,195,468,119.00

C.2 ASET LAINNYA

C.2.1 ASET LAIN-LAIN

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.15,732,923.00 dan Rp.65,802,923.00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya serta dalam proses penghapusan dari BMN.

C.2.2 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.-15,732,923.00 dan Rp.-65,802,923.00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2017, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Lain-lain	15,732,923.00	-15,732,923.00	0.00
	Akumulasi Penyusutan	15,732,923.00	-15,732,923.00	0.00

C.3 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.3.1 UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.29,703,750.00 dan Rp.0.00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	29,703,750.00	0.00
Jumlah	29,703,750.00	0.00

C.4 EKUITAS

C.4.1 EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.41,284,604,033.00 dan Rp.41,284,604,033.00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.